KOMPARASI PENERAPAN PRINSIP KONSERVATISME PADA AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH

Anita Wahyu Alviani¹, Husnul Khotimah², Yolanda Sryta Pradani³, Ahmad Ulil Albab Al Umar⁴, Nur Kabib⁵

^{1,2,3,4,5}) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga
Korespondensi : husnulhotimah.iainsalatiga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan penerapan konservatisme dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Konservatisme adalah sebuah prinsip yang penting dalam pelaporan keuangan yang dapat dilihat dalam bagaimana sebuah entitas mengakui peningkatan pendapatan secara hati-hati sedangkan mereka segera mengakui penurunan kekayaan.

Konservatis merupakan bentuk kehati-hatian dalam akuntansi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konservatisme akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Tetapi ditemukan bahwa akuntansi syariah melaporkan transaksi secara lebih konservatif dari pada akuntansi konvensional. Perbedaan level konservatisme dalam Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional disebabkan oleh tingkat risiko litigasi yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah yang lebih tinggi dan adanya kewajiban untuk membayar zakat.

Kata Kunci : Konservatisme, Akuntansi Konvensional, Akuntansi Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there is difference between conservatism of conventional accounting and sharia accounting. Conservatism is an important principle in financial reporting which can be seen on how an entity recognize an earning increase with delay while they recognize an earning decrease on timely basis. Conservatism is a prudent reaction in accounting. From the results of the analysis, it can be concluded that there is no significant difference between accounting conservatism in conventional accounting and sharia accounting. But I found that sharia accounting report the transactions more conservatively than the conventional one. Differences in the level of conservatism in Sharia Commercial Banks and Conventional Commercial Banks are influenced by the higher litigation risk that is faced by the Sharia Commercial Banks and the obligation to pay Zakah.

Keywords : Conservatism, Conventional Accounting, Sharia Accounting.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat terjadi dalam sektor keuangan syariah selama tiga dekade terakhir. Perkembangan ini terjadi pada berbagai sektor, salah satunya dapat dilihat dalam sector

keuangan syariah yaitu mencakup sector perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan sektor-sektor keuangan syariah lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi motor atas perkembangan pesat ini adalah sektor perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri mengalami rekam jejak yang panjang dalam perjalanan perkembangannya. Diawali dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963 yang kemudian diambil alih serta direstrukturisasi oleh Pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan perbankan syariah ini terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah dengan pendirian *Islamic Development Bank* (1975), tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxemburg (1978), Swiss (1981), dan juga Denmark (1983). Perkembangan perbankan syariah pun terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bank syariah pertama di Malaysia berdiri pada tahun 1982 dan bank syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (Nurhayati, 2019).

Perkembangan dalam sektor keuangan syariah ini tentunya memunculkan kebutuhan akan system pembukuan keuangan yang selaras dengan syariah Islam untuk mengimbangi transaksi yang berlandaskan syariah. Sistem ini disebut dengan akuntansi syariah. Tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah juga berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunan laporan keuangan ini tentunya berdasarkan pada pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas pada sebuah periode akuntansi. Terdapat empat prinsip dasar dalam pencatatan transaksi ini, yaitu prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. Namun dalam menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya mengandung karakteristik kualitatif dalam sebuah laporan keuangan diperlukan perhitungan kendala dominan yang tidak dapat dihindari yaitu menyangkut materialitas dan konservatisme (Kieso, E, Terry, & Warfield, 2008).

Tujuan dari disusunnya artikel ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep konservatisme dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Diharapkan artikel ini dapat mengungkap apakah perbedaan juga ditemui dalam penerapan konsep konservatisme dalam kedua perspektif akuntansi tersebut.

KERANGKA TEORETIS

Konservatisme

Konservatisme didefinisikan sebagai sebuah reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian dimana reaksi ini ditunjukkan untuk melindungi hak-hak serta kepentingan pemegang saham (*shareholder*) dan pemberi pinjaman (*debtholder*) (Ardina, 2017). Sedangkan menurut (Zelmiyanti, 2014) konservatisme merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Prinsip konservatisme akuntansi juga diterapkan di Indonesia. Hal ini diatur dalam PSAK yang di dalamnya terdapat beberapa standar yang memperlihatkan adanya penerapan prinsip konservatisme, diantaranya: **Pertama** adalah PSAK No. 14 (1994) mengenai persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan, paragraf 38 menyatakan bahwa nilai persediaan diukur berdasarkan biaya ataupun nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Pemilihan biaya terendah mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Karena

nilai persediaan yang dilaporkan di dalam neraca merupakan nilai terendah bukan nilai sebenarnya di pasar,

Kedua adalah PSAK No. 16 (1994) mengenai aktiva tetap menyatakan bahwa dalam menilai aktiva tetap, perusahaan menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan (harga pertukaran). Penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan ini juga mengindikasikan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme, misalnya dalam penilaian aktiva tetap berupa tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai tanah jarang mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun kedepan nilai tanah cenderung mengalami peningkatan sedangkan laporan yang diberikan manajemen akan nilai aktiva masih berdasarkan harga perolehan awal dan tidak menyesuaikan dengan peningkatan harga yang dialami di pasar.

Ketiga adalah PSAK No. 19 (2000) mengenai aktiva tidak berwujud, pada paragraf 36 perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahapan riset pada sebuah proyek intern). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada sebuah proyek intern) diakui sebagai beban pada saat terjadi. Namun perusahaan belum bias mengakui adanya penambahan aktiva sebelum proyek tersebut selesai. Oleh karena itu, jumlah beban dalam laporan laba rugi akan mengalami peningkatan sedangkan untuk pendapatan baru diakui pada periode selanjutnya ketika riset tersebut selesai.

Keempat adalah PSAK No. 48 (1998) mengenai penurunan nilai aktiva, paragraf 41 pada PSAK menyatakan bahwa nilai yang diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya. Nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada Laporan Laba/Rugi, dan **Kelima** adalah PSAK 57 (revisi 2000) mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontijensi, dan aktiva. Dalam PSAK No. 57 ini kewajiban estimasi diakui tetapi tidak terdapat pengakuan atas aktiva diestimasi (Zelmiyanti, 2014).

Konservatisme pada umumnya didefinisikan sebagai panduan akuntansi dalam menyajikan aset dan pendapatan yang lebih rendah (*understate*), serta menyajikan liabilitas dan beban yang lebih tinggi (*overstate*). Dalam konsep ini, beban harus segera diakui dibandingkan dengan pendapatan yang tidak semerta-merta diakui sehingga *net income* terlihat rendah. Sehingga pada akhirnya konservatisme akan menyebabkan pelaporan keuangan yang pesimistik yang akan mengurangi optimism dari pengguna laporan. Konsep konservatisme menjadi salah satu hal penting dalam keuangan perusahaan. Hal ini mengingat dengan diterapkannya konservatisme dapat meminimalisir peluang untuk dilakukannya kecurangan oleh manajemen melalui tindakan pengakuan laba secara *overstate*. Dengan begitu maka penerapan konservatisme ini akan melindungi pihak investor (Wahyuni & Muchlis, 2016).

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu : (1) Mengidentifikasi Kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pemebalian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut, (2) Mencatat Secara historis aktivitas keuangan

organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkas, (3) Mengkomunikasikan Kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu unsur penting dalam mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang dilaporkan (Winwin & Ilham, 2006). Pengertian lain adalah bahwa akuntansi merupakan teknologi, sehingga harus diperlakukan sebagai teknologi. Teknologi digunakan untuk mengendalikan variabel-variabel alam dan sosial untuk mencapai kehidupan tertentu yang lebih baik. Apabila akuntansi diarahkan menjadi teori, maka seharusnya teori akuntansi, bebas dari nilai sosial dan tidak bersifat normatif. Teori semestinya tidak mempengaruhi secara langsung terhadap praktik-praktik akuntansi, karena teori tidak sanggup mengendalikan variabel-variabel yang diteorikan (Sudibyo, 1987).

Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah Al-Muhasabah berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-Muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata Ihtiasaba yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya”². Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Selain itu, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.

secara umum prinsip Akuntansi Syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282. 1. Prinsip Pertanggungjawaban Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 2. Prinsip Keadilan Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). 3. Prinsip Kebenaran Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Al- Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif-kualitatif. (Chariri, 2009) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang melihat fakta

sebagai sesuatu yang unik serta memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu. Beliau menambahkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan pandangan dan penjelasan tentang peristiwa social tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap system interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Penelitian ini disusun atas studi atas penelitian dengan tema serupa yang telah ada. Data yang diteliti berupa penelitian dari peneliti terdahulu sejumlah dua penelitian dalam rangka melakukan studi yang nantinya akan menunjukkan komparasi seperti yang dimaksud dalam judul penelitian ini.

DISKUSI

Berkaitan dengan penerapan prinsip konservatisme dalam suatu entitas bisnis. (Handoyo, 2012) menyatakan bahwa konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam pembentukan dan penyajian suatu laporan keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar berupa nilai riil dari transaksi keuangan, baik yang mengalir masuk maupun keluar namun juga menyertakan pencatatan mengenai nilai dari transaksi yang dapat menimbulkan kemungkinan dari masuk dan keluarnya uang di masa mendatang. Adanya ketidakpastian di masa mendatang menjadi alasan mengapa akuntan menerapkan konservatisme akuntansi. Karena pada dasarnya konservatisme merupakan reaksi dari sikap kehati-hatian atau yang disebut dengan *prudent reaction* dalam menghadapi ketidakpastian yang akan melekat dalam perusahaan, aktivitas bisnis, dan ekonomi untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian serta resiko internal yang akan menjadi ancaman dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan (Oktomegah, 2012).

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa sector keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Namun dapat dikatakan bahwa yang mendominasi merupakan lini perbankan syariah. Untuk itu, dalam artikel ini akan dikaji tentang penerapan konsep konservatisme akuntansi pada bank konvensional dan bank syariah. Penerapan konservatisme pada Bank Umum Konvensional telah dikupas dalam penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Konservatisme Akuntansi pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia” yang dilakukan oleh Resti Purnamasari, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie. Konservatisme dianggap sebagai tindakan kehati-hatian yang diwujudkan dengan tidak segera mengakui pendapatan namun segera mengakui beban ketika terjadi pengeluaran. Dinyatakan bahwa manfaat dari diterapkannya prinsip konservatisme diantaranya adalah untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, menghasilkan laba yang berkualitas, meminimalisir tindakan manajemen laba, mengatasi kesulitan keuangan, mengurangi biaya litigasi serta untuk mengurangi konflik antara *bondholders* dengan *shareholders*. (Purnamasari, Meutia, & Yuniartie, 2019)

Seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan pajak berdasarkan jumlah laba bersih yang tertera pada Laporan Laba/Rugi. Ketika suatu entitas menerapkan konservatisme maka akan menyebabkan laba bersih menjadi lebih rendah. Hal ini pun berakibat pada rendahnya hasil perhitungan laba yang harus dibayar oleh entitas tersebut. Selain itu, penerapan konservatisme menyebabkan laba bersih yang dilaporkan perusahaan merupakan nilai yang benar-benar dimiliki perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa laba bersih yang dilaporkan oleh entitas

yang menerapkan konservatisme adalah lebih berkualitas. Adapun berkaitan dengan tindakan manajemen laba, tingkat laba bersih yang menggunakan konservatisme merupakan nilai yang riil. Sehingga akan sulit bagi manajemen untuk melakukan manipulasi atasnya.

Bank Umum Konvensional menghadapi resiko litigasi baik dari investor maupun lembaga lainnya yang mempunyai perlindungan hukum yang melekat pada peraturan yang ada. Baik berdasarkan perjanjian antara perusahaan dan investor ataupun karena adanya peraturan dari regulator yang mengikat yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan perkara hokum apabila hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh pihak bank. Terkait dengan biaya litigasi atau tuntutan hokum maka litigasi lebih kecil kemungkinannya terjadi bagi perusahaan yang *understate net asset* (mengakui kekayaan lebih rendah) dibandingkan dengan perusahaan yang *overstate netasset* (mengakui kekayaan lebih tinggi). Konservatisme akuntansi digunakan untuk menghindarkan Bank Umum Konvensional dari potensi munculnya resiko litigasi karena prinsip ini menyebabkan pengakuan kekayaan lebih rendah (Purnamasari et al., 2019).

Hal serupa juga dapat kita jumpai pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (AlAbbad, 2016). Makna konservatisme dalam akuntansi konvensional yaitu pengakuan beban yang lebih awal sedangkan pendapatan tidak segera diakui. Salah satu yang menjadi motivasi penerapan konservatisme dalam entitas konvensional adalah untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini karena dengan rendahnya laba pada Laporan Laba/Rugi sebagai akibat dari diterapkannya konservatisme akan menjadikan jumlah pajak lebih kecil. Kepentingan litigasi juga memotivasi Bank Umum Konvensional untuk menerapkan konservatisme sehingga dapat terhindar dari tuntutan yang dapat merugikan perusahaan.

Adapun penerapan konservatisme pada Bank Umum Syariah dirasa tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pada Bank Umum Konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam manfaat penerapan konservatisme yang sama-sama untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, menghasilkan laba yang berkualitas, mempersempit kesempatan untuk dilakukannya tindakan manajemen laba, mengatasi kesulitan keuangan, dan mengurangi biaya litigasi serta untuk mengurangi konflik antara *bondholders* dengan *shareholders*. Selain itu konsep mengenai konservatisme ini pun sama pada kedua jenis bank tersebut, yaitu mengenai pengakuan laba secara *understate* dan pengakuan beban secara *overstate*. Sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme yang diterapkan dalam entitas konvensional maupun syariah adalah sama. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamasari dkk dan Al Abbad menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya, namun entitas syariah dinyatakan lebih konservatif apabila dibandingkan dengan entitas konvensional.

Hasil penelitian (Purnamasari et al., 2019) menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki nilai rata-rata rasio konservatis lebih tinggi daripada Bank Umum Konvensional hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata Bank Umum Syariah sebesar 0,18842416 sedangkan Bank Umum Konvensional hanya sebesar 0,00819275. Adapun Bank Umum Syariah bersifat konservatif sebanyak 33 kali dan bersifat tidak konservatif sebanyak 19 kali sedangkan Bank Umum Konvensional bersifat konservatif sebanyak 29 kali dan 23 kali bersifat tidak konservatif selama periode 2011 hingga 2015. Rata-rata tingkat konservatisme akuntansi untuk Bank Umum Syariah sebesar -2,9195 dan Bank Umum Konvensional sebesar -3,6381. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata konservatisme Bank umum Syariah lebih

konservatif. Tingkat konservatisme yang lebih tinggi ini dipengaruhi oleh adanya kewajiban untuk membayar zakat, biaya litigasi yang lebih besar, dan prinsip amanah yang terdapat dalam Bank Umum Syariah.

Selain berkewajiban untuk membayar pajak, ada pengeluaran lain yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah mengenai laba bersih yang diperoleh, yaitu zakat. Perhitungan zakat ini juga berdasarkan laba yang dilaporkan dalam Laporan Laba /Rugi. Sehingga pengaruh penerapan konservatisme terhadap jumlah zakat yang harus dibayar adalah sama dengan pengaruhnya terhadap jumlah pajak. Untuk itu, karena entitas syariah mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi maka entitas syariah bersikap lebih konservatis. Hal ini pun juga dikarenakan oleh sikap moral yang terdapat dalam entitas syariahnya itu prinsip amanah. Entitas syariah melaksanakan kegiatannya tidak hanya untuk memperoleh keuangan duniawi, namun juga mempertimbangkan urusan akhirat. Hal ini dapat dimaknai bahwa entitas syariah lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya termasuk dalam aspek keuangan yang diwujudkan dengan penerapan prinsip konservatisme.

Kenyataan bahwa bank syariah merefleksikan kerugian (pengeluaran) lebih cepat dibandingkan dengan keuntungan (pendapatan) dalam laporan mengindikasikan bahwa bank syariah menggunakan pendekatan konservatisme akuntansi yang sama dengan yang diterapkan dalam bank konvensional. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa 'syariah' tidak memainkan peranan yang signifikan dalam pelaporan keuangan. Dalam analisis lebih lanjut, Al Abbad menjumpai bahwa pelaporan bank syariah dilakukan dengan lebih konservatif dibandingkan dengan yang terdapat dalam bank konvensional. Ia menyatakan bahwa bank syariah menggunakan konservatisme dalam melaporkan pendapatan untuk mengurangi kewajiban pajak serta zakat. Penemuan ini juga berkaitan dengan penjelasan litigasi dari konservatis memperingatkan manajer pada bank syariah lebih religius, lebih menghindari risiko, dan mempunyai dorongan yang lebih untuk merendahkan pendapatan dengan melakukan pelaporan secara lebih konservatif. (Al Abbad, 2016)

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penerapan konservatisme dalam kedua jenis entitas ini, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah adalah sama. Tidak ada perbedaan signifikan mengingat konsep yang diterapkan adalah sama serta memiliki pengaruh yang sama. Namun, dapat kita lihat bahwa akuntansi syariah dalam Bank Umum Syariah bersikap lebih konservatis dibandingkan dengan akuntansi konvensional Bank Umum Konvensional.

KESIMPULAN

Konservatisme merupakan sebuah prinsip dalam akuntansi dimana pendapatan tidak segera diakui namun apabila terdapat beban maka segera diakui. Hal ini merupakan akibat dari digunakannya prinsip akrual. Konservatisme berperan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, menghasilkan laba yang berkualitas, meminimalisir tindakan manajemen laba, mengatasi kesulitan keuangan, mengurangi biaya litigasi serta untuk mengurangi konflik antara *bondholders* dengan *shareholders*. Prinsip konservatisme ini diterapkan dalam dua sisi keuangan, yaitu konvensional dan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah dalam perbankan syariah bersikap lebih konservatif dalam membuat laporan keuangan. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh kewajiban Bank Umum Syariah untuk membayar zakat dan prinsip amanah yang dipegang teguh oleh entitas

syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan atas konservatisme yang diterapkan dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Hanya saja, akuntansi syariah lebih konservatif dari akuntansi konvensional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT dan berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Baik bantuan berupa sumbangan ide, masukan maupun saran, dan juga berupa pacuan semangat untuk penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abbad, A. (2016). Accounting Conservatism in Islamic Banking. *International Review of Accounting, Banking & Finance*, 8(1), 32–53. Retrieved from [http:// search. ebscohost. com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=117519690&lang=pt-br&site=eds-live & auth- type=uid](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=117519690&lang=pt-br&site=eds-live&auth-type=uid)
- Ardina, A. M. Y. (2017). Penggunaan Perspektif Positive Accounting Terhadap Konservatisme Akuntansi Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 1–74.
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Handojo, I. (2012). Sekelumit Konservatisme Akuntansi.
- Kieso, E. D., Terry, J. J., & Warfield, T. D. (2008). *Akuntansi Intermediate: Edisi kedua belas Jilid 1* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, S. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.; S. Nurhayati, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Oktomegah, C. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmiah INFOTEK*, 1(1), 65–74.
- Purnamasari, R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Perbandingan Tingkat Konservatisme Akuntansi Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 41–56. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9307>
- Wahyuni, A., & Muchlis, M. (2016). Implikasi Konservatisme Akuntansi terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam melalui Prinsip Muqabalah pada KSP Nasional Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 1–20.
- Zelmiyanti, R. (2014). Perkembangan Penerapan Prinsip Konservatisme dalam Akuntansi. *JRAK*, 39(1), 50–55. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>